



Awaluddin Akui Dana KJP Terlambat karena Pemadanan dan Verifikasi Ulang

Palmerah, Warta Kota

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menjelaskan alasan keterlambatan pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang disebabkan proses seleksi ketat pada 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, Disdik ingin memastikan penerima KJP Plus tepat sasaran untuk warga Jakarta yang kurang mampu.

"Program ini harus tepat sasaran, serta bantuan ini distribusinya harus lebih selektif kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Budi dalam keterangan yang diterima, Senin (10/6/2024).

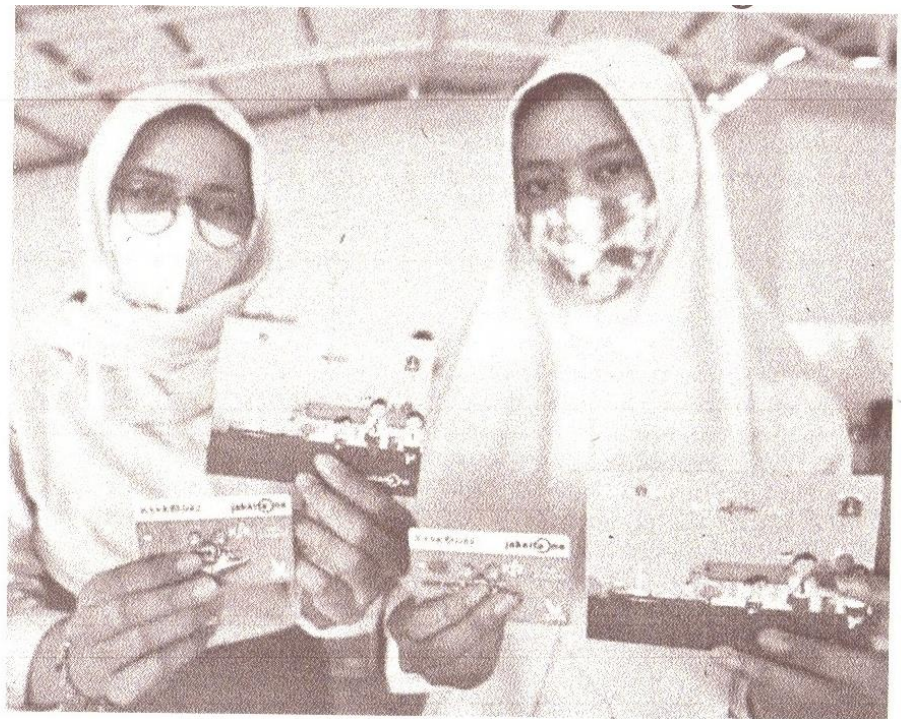
Budi mengatakan, pelajar dari jenjang SD sampai SMA/ sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta, jika tergolong sebagai warga tidak mampu, maka yang bersangkutan berhak menjadi penerima KJP Plus.

"Distribusi pada tahap I 2024 sedikit terlambat karena perlu pemadanan dan verifikasi ulang, seperti penerima dipastikan warga DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta," ujarnya.

Kemudian, penerima KJP Plus tidak boleh memiliki kendaraan roda empat, serta aset properti di atas satu miliar rupiah.

Selain itu, Disdik harus memastikan dalam kartu keluarga penerima juga tidak ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, anggota MPR RI/ DPR RI/ DPD RI/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, ataupun pegawai tetap BUMN/ BUMD.

"Untuk memastikan penerima KJP Plus sesuai dengan persyaratan, perlu dilakukan verifikasi lapangan. Tentunya masyarakat



Tribunnews/Jeprima

TUNJUKKAN KARTU — (Ilustrasi) Dua orang siswa menunjukkan Kartu KJP Plus. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan akan mencairkan dana KJP Plus pada pekan ini.

ingin melihat dan merasakan penerima KJP Plus tepat sasaran," imbuh Budi.

Budi menambahkan, hingga saat ini data dari hasil pemadanan dan verifikasi tim verifikator di lapangan masih terus bergerak.

"Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir, saya pastikan cair minggu ini," tandasnya.

Sebagai informasi, KJP Plus merupakan program dalam memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar pada

DTKS.

Pihaknya pun memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan cair pada minggu ini, atau pekan kedua Juni 2024.

"Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir, saya pastikan cair minggu ini," ujar Budi.

Budi mengatakan, pencairan KJP plus akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Saat ini, proses pendataan masih dilakukan.

"Kami hanya ingin menjaga dan memastikan anggaran yang diperuntukkan untuk warga tidak mampu ini tepat sasaran," ujar Budi. **(Kompas.com)**